

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA

KANDRI, KECAMATAN GUNUNGPATI, KOTA SEMARANG



Wandira Naibaho, Herbasuki Nurcahyanto, Aufarol Marom

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

Telepon/Faksimile (024) 7465407

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Community empowerment through the development of Kandri Tourism Village, Gunungpati District, Semarang City is based on increasing empowerment efforts to improve the economy, welfare and standard of living of the people of Kandri Tourism Village. The problems of this research are that the management system is not fully structured and optimally organized, problems with the quality of the physical environment and limited infrastructure, lack of outreach or training, and lack of government and community involvement in empowerment. The purpose of this research is to analyze empowerment efforts and the inhibiting factors for the sustainability of empowerment. Efforts to answer the problems and research objectives use the Community Empowerment theory put forward by Mardikanto by using descriptive research methods and qualitative approaches. The data obtained in this study through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that community empowerment through the development of the Kandri Tourism Village, Gunungpati District, Semarang City has made good empowerment efforts. This can be seen from the 4 indicators, namely human development, business development, environmental development, and institutional development. Empowerment efforts in Kandri Tourism Village have not been fully achieved because there are several obstacles that occur, namely limited involvement and quality of human resources, limited facilities and infrastructure, and limited physical environmental conditions. It is suggested to the Pandanaran Tourism Awareness Group (POKDARWIS) to be able to increase the role of the Government and the Community, increase the availability of infrastructure, improve the quality of the physical environment so that community empowerment in Kandri Tourism Village can be carried out optimally.

Keywords: *Empowerment, Community, Tourism Village Development*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan sektor paling menjanjikan karena sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan, hingga meningkatkan perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemulihan kualitas Pariwisata Indonesia dari berbagai aspek.

Salah satu jenis pariwisata yang sedang populer belakangan ini adalah Desa Wisata. Desa Wisata merupakan konsep pembangunan dan

pengembangan desa berbasis ekonomi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di suatu desa dan untuk mengatasi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Menurut Nuryanti (Dalam Yuliati & Suwandono, 2016) desa wisata merupakan wujud kombinasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dikemas dalam suatu pola kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku sehingga menjadikan desa tersebut sebagai tujuan wisata. Hal yang menjadi keunggulan desa wisata bukan hanya penampakan alam, melainkan masyarakat desa yang dijadikan sebagai subjek aktif, dimana lingkungan tempat tinggal masyarakat beserta keadaan disekitarnya dijadikan menjadi tujuan wisata. Kehidupan sosial masyarakat ikut andil sehingga tidak cukup menampilkan visual desa melainkan masyarakat dituntut berpartisipasi aktif (Ajeng Dini Utami, 2019). Keberadaan desa wisata diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup beserta lingkungan. Pengembangan desa wisata mencakup banyak aspek seperti wisata yang berbasis alam, budaya, adat istiadat, pembangunan berkelanjutan,

pengembangan bisnis ekonomi kreatif, dan lain sebagainya (Desi Pravita, 2018).

Kota Semarang sendiri memiliki beberapa jenis desa wisata unggulan yang menjadi pilihan tepat untuk dikunjungi, diantaranya desa wisata Lerep, desa wisata Jamalsari, desa wisata Jatirejo, desa wisata Wonolopo, desa wisata Kandri, dan lain sebagainya. Salah satu desa wisata yang sangat diunggulkan adalah Desa Wisata Kandri yang berada di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Desa Wisata Kandri dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 556/407 Tanggal 21 Desember 2012. Desa Wisata Kandri cukup berpotensi untuk dipopulerkan menjadi salah satu wisata unggulan di Kota Semarang. Desa wisata Kandri memiliki potensi wisata alam unggulan diantaranya Goa Kreo, potensi wisata buatan berupa Waduk Jatibarang, dan potensi wisata minat khusus berupa Ekowisata dan Eduwisata, disediakan paket wisata untuk rombongan anak usia pra-sekolah dan usia sekolah, mulai SD hingga Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dewi Wisata Kandri dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya Kantor

sekretariat pengelola Desa Wisata, pemandu wisata, toilet, homestay, area parkir, kereta wisata, paket wisata, kebun buah, sanggar seni Omah Alas, papan informasi, penunjuk arah, kios UMKM, area camping dan outbond, area memancing, river tubing, dan kandri etnik. Makanan khas desa wisata Kandri yaitu Sego Kethek. Oleh-oleh khasnya yaitu wingsing, jenang tape, dodol tape, sikela, getuk, yang terbuat dari bahan baku singkong, dan lain sebagainya. Keragaman seni yang terdapat di desa wisata ini adalah gendongan lesung, kempling kemanak, gamelan, karawitan, dan sanggar tari (Prabowo & Pamurti, 2021). Kekayaan alam, budaya, serta potensi lain yang dimiliki oleh Desa wisata Kandri berhasil meraih penghargaan Trisakti Tourism Award 2021, dengan meraih juara harapan tiga, kategori desa wisata alam sehingga Desa Wisata Kandri dinilai cukup berpotensi menjadi desa wisata unggulan yang layak untuk dikunjungi. Berikut grafik kunjungan wisatawan di Desa Wisata Kandri pada tahun 2017-2021:



Sumber: Profil Desa Wisata Kandri 2022

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dari tahun 2017-2019, namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 hingga 2021. Sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara mengalami pasang surut. Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan pada tahun 2017-2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2021, tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara ke Desa Wisata Kandri. Meskipun berpotensi sebagai Desa Wisata unggulan, desa wisata Kandri tentunya masih dihadapkan dengan beberapa

persoalan yang sewaktu-waktu dapat menghambat pembangunan dan pengembangan desa (Ardito Bhinadi, 2017).

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti pada saat survey pra-penelitian, terdapat beberapa permasalahan dalam perkembangan Desa Wisata Kandri diantaranya sistem pengelolaan Desa wisata Kandri belum sepenuhnya terstruktur dan teorganisasi secara optimal, kondisi lingkungan sebagai penunjang kegiatan desa wisata juga masih jauh dari kata sempurna. Persoalan lain yaitu minimnya sosialisasi atau pelatihan guna meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia agar memiliki keterampilan untuk mendukung perkembangan Desa wisata Kandri. Disamping itu, kondisi lingkungan fisik serta infrastruktur masih menjadi permasalahan di Desa Wisata Kandri. Pertama, sarana prasarana penunjang pariwisata tidak dipergunakan dengan baik. Kedua, masalah kebersihan sampah. Masalah kebersihan sampah masih menjadi masalah yang berlarut-larut. Masih terdapat banyak sampah di beberapa spot wisata, salah satunya di sekitaran jalan menuju pendopo, juga

tepat di lokasi Pendopo Omah Pinter Petani (OPP). Ketiga, masalah infrastruktur. Kemudian, belum tersedia souvenir khas dan belum tersedianya arts galeri guna mendukung pengembangan desa wisata. Produk olahan Desa Wisata Kandri juga bukan produk olahan yang khas, dimana Desa ini hanya mengolah pangan berdasarkan apa yang ditanam oleh para petani dan pekebun yang ikut serta dalam pemberdayaan, seperti olahan singkong, belimbing, alpukat, jambu, dan lain sebagainya. Permasalahan yang terakhir yaitu kurangnya keterlibatan Pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan keberlangsungan Desa Wisata Kandri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu komponen utama dalam mengatasi permasalahan di Desa Wisata Kandri sebagai desa wisata untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu memanfaatkan potensi pariwisata guna meningkatkan perekonomian. Pemberdayaan masyarakat cukup fundamental mengingat mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Wisata Kandri bekerja di sektor pertanian, yang kemudian akan beralih fungsi menjadi aktor utama sebagai pelaku usaha dibidang pariwisata. Oleh karena itu,

pemberdayaan masyarakat harus berjalan sejalan dengan visi misi Desa Wisata Kandri. Akan tetapi, terdapat kendala ketidakberdayaan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Ketidakberdayaan masyarakat diantaranya terkait dengan sulitnya merubah pola pikir masyarakat, dimana masyarakat belum siap secara mental dan fisik dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungannya. Mayoritas masyarakat masih belum cukup memahami perbedaan antara objek wisata dengan desa wisata itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan sumber daya manusia yang memiliki pola pikir yang masih rendah dan cenderung primitif (Isnaningtyas & Marlina, 2017). Ketidakberdayaan lainnya disebabkan oleh kondisi demografis, seperti mayoritas tingkat pendidikan hanya pada sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan minimnya pengalaman dari pengelola Pokdarwis dalam bidang manajemen. Hambatan-hambatan yang terjadi yaitu belum semua warga Desa Wisata Kandri ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan dalam upaya pemberdayaan. Meskipun pelatihan diselenggarakan, akan tetapi pelatihan tersebut hanya melibatkan sebagian

masyarakat Kandri yang mempunyai usaha industri rumah tangga, yang artinya masih banyak masyarakat yang belum terlibat dalam kegiatan pelatihan tersebut. Ketidakterdayaan dan hambatan-hambatan yang terjadi menjadi tantangan bagi Pokdarwis dan masyarakat agar meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar semakin mandiri dalam segala aspek (Rahmawati et al., 2015). Selain memanfaatkan potensi-potensi alam, Kandri juga perlu memanfaatkan mutu sumber daya manusianya. Selain itu, masyarakat juga harus dipacu lewat kerjasama dengan para stakeholders dengan melakukan berbagai kegiatan kepelatihan yang melibatkan pihak-pihak luar seperti akademisi maupun pihak swasta (Dewani et al., 2017).

Berdasarkan fenomena tersebut, hal ini menarik untuk diteliti dengan mengedepankan peran manajemen publik dan manajemen pariwisata untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pembangunan dan pengembangan Desa Wisata Kandri serta membutuhkan peran sumber daya manusia lewat pemberdayaan masyarakat. Dibutuhkan juga integritas dari seluruh stakeholder guna untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat

melalui pengembangan desa wisata Kandri. Berbagai permasalahan yang ada tidak akan terselesaikan jika pemberdayaan masyarakat bersifat pasif dalam upaya pengembangan desa wisata Kandri. Harapannya, Desa Wisata Kandri mampu menarik lebih banyak wisatawan dari seluruh penjuru dunia, mampu berkembang menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Semarang yang dapat bersanding dengan Desa Wisata TOP 5 di seluruh Indonesia, khususnya mampu memberdayakan masyarakatnya dengan melengkapi fasilitas, infrastruktur, serta sumber daya manusia, alam yang ahli sebagai wujud penerapan manajemen publik khususnya di wilayah Desa Kandri. Peneliti mencoba melakukan penelitian di Desa Wisata Kandri dengan harapan dapat mendeskripsikan berbagai fenomena yang terjadi di Desa Wisata Kandri dan menemukan berbagai solusi solutif dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam, oleh sebab itu peneliti mengambil judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.”

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Kandri di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?
- 2) Apa saja faktor penghambat Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?

B. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Chandler & Plano, dikutip dalam Yeremias T (2014) mengemukakan administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir, dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang

organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2003:100) Pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto harus meliputi beberapa upaya pokok diantaranya:

1. Bina kemanusiaan
2. Bina Usaha
3. Bina Lingkungan
4. Bina Lembaga.

Upaya pokok Mardikanto didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pula dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Desa Wisata

Menurut Ervina (2018: 48), Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas

sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, mewadahi peran, dan partisipasi masyarakat.

Tujuan dari pembentukan desa wisata yaitu untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan. Selain itu, pembentukan desa wisata dapat bersinergi dalam bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah. Desa wisata berfungsi sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi wisata dan terciptanya *Sapta Pesona* di lingkungan wilayah di destinasi wisata. Hal tersebut merupakan unsur kemitraan baik bagi Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan kepariwisataan di daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Kandri di Kecamatan Guungpati, Kota Semarang

Penelitian ini menganalisis upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Kandri

dengan menggunakan teori dari Mardikanto dengan fenomena yang meliputi bina kemanusiaan, bina lingkungan, bina usaha, dan bina lembaga.

1. Bina Manusia

Desa Wisata Kandri melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran senantiasa mendukung sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan agar dapat mengembangkan kapasitas individu dan mengembangkan mutu sumber daya manusia untuk dapat mandiri dan berdaya sesuai dengan tujuan akhir pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber penelitian, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Kandri telah melakukan beberapa program-program yang mendukung peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pembinaan maupun penyuluhan.

Terdapat program-program pelatihan, sosialisasi, maupun penyuluhan diantaranya sertifikasi pengelola Pokdarwis, sosialisasi di bidang UMKM yang meliputi

pengolahan, *packaging*, hingga pemasaran, pelatihan kepada para pemilik *homestay*/penginapan, sosialisasi tentang *entrepreneur*, *marketing*, dan lain sebagainya. Pemberdayaan juga diberikan kepada sumber daya manusia yang ada di lingkungan internal Desa Wisata Kandri agar selalu dapat memberdayakan setiap anggotanya sesuai dengan peran masing-masing untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga memberikan arahan mengenai peran yang diemban oleh setiap anggota Pokdarwis Pandanaran agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan tupoksi yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang cukup dinamis, berkesinambungan, serta mendorong keterlibatan segala bentuk potensi masyarakat agar pemberdayaan evolutif dengan melibatkan segala potensi yang ada. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus tercapai.

Oleh sebab itu, pemberdayaan tidak sebatas melakukan pelatihan maupun sosialisasi, tetapi membutuhkan keterlibatan yang cukup krusial dari masyarakat agar pemberdayaan itu terlaksana. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pelatihan, sosialisasi ataupun penyuluhan di Desa Wisata Kandri masih relatif. Meskipun keterlibatan masyarakat masih relatif kurang, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang merasa jemu dengan keberadaan sosialisasi dan penyuluhan yang dirasa monoton. Di era sekarang, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar sosialisasi yaitu praktek langsung dan tunjangan finansial.

Proses pemberdayaan tidak berhasil dengan sendirinya, tetapi butuh keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat sehingga dapat berdaya guna. Masyarakat Desa Wisata Kandri juga memerlukan kegiatan yang lebih dari sekadar sosialisasi maupun pelatihan, karena Desa Wisata Kandri dirasa sudah cukup lama berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata sehingga sudah merasa jemu terhadap

keberadaan sosialisasi, pelatihan, maupun penyuluhan. Terlepas dari keterlibatan tersebut, masyarakat Kandri masih tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan di Desa yang dapat menunjang kemampuan individu dan perekonomian mereka. Sejauh ini, masyarakat Desa Wisata Kandri dirasa telah menerima manfaat lewat pengembangan Desa Wisata Kandri.

Masyarakat telah mendapatkan banyak manfaat lewat hadirnya Desa Wisata Kandri, diantaranya perekonomian yang semakin meningkat, daya jual produk masyarakat juga meningkat, kas wilayah pun ikut meningkat. Manfaat ini cukup dirasakan masyarakat terutama yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Manfaat ini cukup dirasakan oleh para pelaku UMKM karena dapat memasarkan produk yang telah diolah secara langsung dan dikemas dalam paket wisata sehingga menghasilkan banyak keuntungan. Dalam pencapaiannya, pemberdayaan memiliki makna memberikan dorongan, motivasi, bimbingan, serta pendampingan

dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mandiri dan berdaya.

2. Bina Usaha

a. Pengembangan jejaring Kemitraan

Pengembangan jejaring kemitraan pada upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi pemberdayaan agar dapat memberikan hasil yang maksimal karena kemitraan merupakan upaya mengkolaborasikan beberapa sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama. Desa Wisata Kandri bersinergi aktif dalam menjalin kemitraan dengan pihak luar.

Perusahaan dan akademisi aktif memberikan bantuan dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Kemitraan yang aktif memberikan patronasi bagi desa diantaranya Pertamina, BNI, Angkasa Pura 1, Oppo, BCA, Bank Jateng, dan lain sebagainya. Biasanya para mitra memberikan bantuan dalam

bentuk fisik maupun event tahunan Desa Wisata Kandri.

b. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor utama dalam pengembangan Desa Wisata Kandri karena berguna dalam menunjang penyelenggaraan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengembangannya, Desa Wisata Kandri telah memperoleh bantuan berupa penyuluhan, pelatihan, dan sarana prasarana. Sarana prasarana yang terdapat di Desa Wisata Kandri didominasi oleh bantuan dari pihak luar, diantaranya Pemerintah, CSR, dan *stakeholders* lainnya.

Desa Wisata Kandri tidak mendapatkan dukungan sarana prasarana dari Desa, melainkan hanya dari Pemerintah Provinsi, Pusat, CSR (Pertamina, Angkasa Pura 1) dan Perguruan Tinggi (UNIKA Soegijapranata). Pengembangan sarana prasarana yang telah berjalan di Desa

Wisata Kandri diantaranya bangunan OPP, gazebo, transportasi berupa kereta wisata, jalur penghubung, jalan darat masing masing RT/RW, jaringan telekomunikasi, listrik. Keberadaan sarana dan prasarana di Desa Wisata Kandri tentu tidak lepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan.

Selain pengembangan jejaring dan kemitraan, sarana prasarana, Desa Wisata Kandri juga memaksimalkan bina usaha lewat keberadaan UMKM yang dapat meningkatkan usaha perekonomian rakyat. UMKM mendapatkan bantuan dan dukungan dari Pokdarwis, juga pihak luar diantaranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Dinas Koperasi Kota Semarang, UPPD Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Pertanian Kota Semarang, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga perguruan tinggi seperti UNIKA Soegijapranata dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) juga ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kandri.

Di samping itu, Pokdarwis juga aktif membina para pelaku UMKM melalui asosiasi Mekarsari (asosiasi UMKM yang berafiliasi dengan Pokdarwis) yang memiliki 42 anggota. Bina usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan pokdarwis yang disertai dengan partisipatif aktif masyarakat dapat menunjang sarana prasarana dan peningkatan usaha masyarakat dalam lingkungan yang sudah terbina.

3. Bina Lingkungan

Pemanfaatan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Wisata Kandri merupakan suatu upaya memberdayakan masyarakat dengan cara melakukan pelestarian lingkungan hidup dengan cara memaksimalkan potensi lokal Desa Wisata Kandri untuk dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dan juga memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan. Bina lingkungan yang telah berjalan di desa wisata Kandri adalah melakukan gotong royong secara rutin, mengadakan program penghijauan, reboisasi, penebaran

ikan, juga dilakukan rutin yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan. Disamping itu, kondisi lingkungan fisik yang asri dan hijau sudah cukup menunjang kunjungan para wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Disamping itu, lingkungan sosial juga sudah cukup menunjang para wisatawan lewat kebiasaan masyarakat yang ramah-tamah kepada para pengunjung dan selalu menerapkan 3S (senyum, salam, sapa).

Lingkungan fisik Desa Wisata Kandri sudah dimanfaatkan dengan baik, akan tetapi masih memerlukan banyak pembenahan dan masih perlu di kaji ulang. *Safety* masih perlu ditingkatkan agar para pengunjung khususnya anak-anak dan lansia dapat menikmati fasilitas dalam keadaan aman dan nyaman, terutama di lingkungan Omah Pintar Petani (OPP) karena mayoritas kegiatan wisata dilaksanakan di OPP dan sekitarnya. Disamping itu, kuantitas dan kualitas dari toilet masih memerlukan pembenahan. Sejauh ini, toilet yang tersedia di OPP hanya

berjumlah 2 dengan fasilitas yang sangat minim.

Kebersihan dan kuantitas toilet menjadi salah satu faktor penunjang yang memengaruhi minat kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata. Pembangunan toilet umum dengan keterbatasan dana dan hanya mengandalkan pendapatan hasil wisata tentunya bukan hal yang mudah. Di sisi lain, masih banyak prasarana yang perlu di benahi. Sejalan dengan pendapat Ketua Pokdarwis Pandanaran, ketersediaan toilet belum menjadi prioritas karena keterbatasan dana. Disamping itu, kesadaran masyarakat akan kebersihan toilet juga masih kurang. Mencermati kondisi di atas, toilet merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dan menjadi simbol pelayanan suatu kawasan. Toilet merupakan salah satu indikator pariwisata, dan sudah seharusnya dijadikan layak, kebutuhan air terpenuhi, dan kebersihannya sesuai dengan standar agar wisatawan merasa nyaman ketika berkunjung ke Desa Wisata Kandri. Selain toilet, keterbatasan lain adalah kurangnya

lahan parkir. Lahan parkir yang berada di sekitar OPP masih terbatas, terlebih jika kunjungan melonjak. Ketika ada kegiatan wisata, bus-bus wisata akan parkir di sisi kiri atau kanan jalan sehingga menghambat lalu lintas jika ada kendaraan yang melintas dari dua arah.

Solusi sementara atas permasalahan ini adalah Pokdarwis Pandanaran mengakali lahan parkir dengan meminjam lahan milik Kelurahan Kandri yang terletak di RW 2. Namun, lokasi parkir sedikit jauh dari pusat kegiatan wisata, sehingga Pokdarwis juga meniasati penggunaan odong-odong/kereta wisata untuk membawa wisatawan ke lokasi wisata.

Meskipun tak luput dari keterbatasan, sejauh ini lingkungan fisik dan sosial yang terdapat di Desa Wisata Kandri sudah cukup menunjang kegiatan pemberdayaan, baik dari sisi proses pemberdayaan, ketersediaan fasilitas, pengelolaan sumber daya alam, budidaya perkebunan dan pertanian, serta interaksi masyarakat sekitar. Dengan adanya lingkungan fisik dan sosial

yang memadai dan mendukung akan berpotensi dalam keberlangsungan pengembangan wisata Kandri dan upaya pembangunan berkelanjutan. Dalam mendukung lingkungan sosial di Desa Wisata Kandri, masyarakat selalu menjaga hubungan baik yang satu dengan yang lainnya, menciptakan mitra kerja sehingga terbentuk jaringan dan hubungan kompeten yang.

4. Bina Lembaga

Berbagai kerjasama telah dilakukan oleh Pihak Pengelola Desa Wisata Kandri dalam hal pengembangan kemampuan masyarakat dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu menyelenggarakan pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, dan sertifikasi terkait kesiapan pengelola Pokdarwis dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, produksi hingga pemasaran produk usaha UMKM, kesiapan masyarakat yang memiliki bisnis homestay, penyediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat turut aktif karena pemberdayaan bersifat dinamis guna

untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan aktif dalam segala kegiatan baik itu dalam hal pelatihan maupun pembinaan.

Sejalan dengan peran Pemerintah yang memberikan bantuan dan dukungan kepada Desa Wisata Kandri, Pemerintah saat ini belum memberikan kewenangan penuh kepada Pokdarwis untuk mengurus sendiri Desa Wisatanya. Meskipun bisa berdiri sendiri karena pada dasarnya pembentukan Desa Wisata ini atas inisiatif masyarakat sendiri, namun Pemerintah tetap memiliki peran krusial dalam penyelenggaraannya seperti sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan desa dan regulasi lain yang dirasa penting bagi keberlangsungan Desa Wisata Kandri.

Selain Pemerintah, Desa Wisata Kandri juga menjalin kerjasama dengan pihak luar. Kerjasama yang telah terjalin diantara pihak pengelola Desa Wisata Kandri dengan para *stakeholders* sejauh ini sudah cukup baik. Proses kolaborasi dalam

pengembangan Desa Wisata Kandri awalnya melibatkan pihak swasta (CSR) dari PT. Pertamina yang diawali oleh pengajuan proposal yang dibuat oleh perwakilan masyarakat Desa Kandri. Hal ini dikarenakan beberapa pihak dari Kandri mempunyai keinginan untuk memberdayakan masyarakatnya agar semakin berdaya dan mandiri dengan mengandalkan lingkungan fisik yang telah ada. Sejauh ini, kerjasama yang telah terjalin cukup baik.

Pokdarwis menjaga kerjasama yang baik dengan para *stakeholders*. Dalam hal ini Pokdarwis dan CSR berkomitmen untuk mencapai tujuan masing-masing dan saling memahami kebutuhan bersama. Terdapat komitmen yang cukup tinggi diantara semua pihak karena ada bantuan dan dukungan yang diberikan dalam bentuk bantuan fisik, sponsor, dan bantuan lainnya.

B. Faktor-Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Kandri di

Kecamatan Guungpati, Kota Semarang

Penulis menganalisis hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kandri dengan merujuk pada 4 dimensi dalam upaya pokok pemberdayaan. Terdapat dimensi yang belum maksimal sehingga menemukan hambatan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan-hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penghambat pengembangan Desa Wisata Kandri keterbatasan sumber daya manusia yang meliputi adanya perbedaan kepentingan dan kepercayaan masyarakat, masyarakat belum memahami posisinya dalam pemberdayaan, juga latar belakang pekerjaan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mau terlibat dalam kepengurusan desa wisata. Masih terdapat perbedaan persepsi antar anggota masyarakat sehingga terjadi sedikit benturan antara anggota masyarakat dengan pengurus desa wisata.

Pengelola Desa Wisata Kandri hingga kini bersinergi melakukan musyawarah, pendekatan-pendekatan baik secara personal maupun berkelompok, dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, agar masyarakat memiliki minat untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Pengelola desa wisata berusaha meyakinkan tokoh masyarakat dan tokoh agama bahwa yang di kemas di Desa Wisata Kandri merupakan paket wisata yang bermanfaat bagi masyarakat serta dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Desa Wisata Kandri masih jauh dari harapan, seperti tidak tersedianya lahan parkir, terbatasnya kereta wisata/odong-odong, tidak ada gedung atau pusat oleh-oleh, kualitas toilet yang masih rendah, dan lain sebagainya.

Keterbatasan seperti ini sewaktu-waktu dapat menghambat kegiatan di desa. Padahal, keberadaan sarana dan prasarana akan sangat menentukan mobilitas

dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas pemberdayaan. Langkah sementara yang tengah diupayakan oleh Pokdarwis adalah dengan memaksimalkan fasilitas yang ada dan dana yang tersedia serta mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana lewat bantuan dengan pihak luar, seperti CSR dan perguruan tinggi. Disamping itu, Pokdarwis dan masyarakat senantiasa berkolaborasi untuk meyakinkan para wisatawan bahwa keterbatasan-keterbatasan itu tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

3. Kondisi Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik di Desa Wisata Kandri masih jauh dari kata sempurna. Lingkungan di desa Kandri masih perlu di kaji ulang dan memerlukan banyak pembenahan. Pembenahan ini dapat dimulai dari kesadaran akan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan terlibat aktif dalam penyelenggaraan bina lingkungan. Melalui keterlibatan yang aktif, masyarakat diharapkan dapat

memberikan dampak nyata sehingga memberikan pengaruh yang baik terhadap kelestarian lingkungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Kandri secara garis besar telah memenuhi keempat upaya pemberdayaan dengan Bina Usaha yang paling mendominasi. Pemberdayaan masyarakat juga telah membawa dampak yang positif pada peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Wisata Kandri.

Dalam Pelaksanaannya, ditemukan pula faktor penghambat pemberdayaan yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, dan kondisi lingkungan fisik.

Saran

- 1) Meningkatkan peran Pemerintah, terutama Dinas yang menaungi dan membina Desa Wisata Kandri agar program-program yang dijalankan tidak hanya sebatas formalitas melainkan program yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan peran masyarakat dalam pemberdayaan dengan tidak hanya sebatas pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan formal, namun eksekusi atas

materi yang telah diterima agar masyarakat mampu meningkatkan peran dan produktivitasnya.

- 3) Meningkatkan peran Pemerintah Kelurahan dan Pokdarwis Pandanaran agar tidak hanya mengandalkan dana hasil kegiatan wisata di desa dan meningkatkan optimalisasi.
- 4) Penggunaan dana hasil kegiatan desa agar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, dengan memfokuskan kembali anggarannya untuk pemenuhan kebutuhan wisata agar mampu menunjang pengembangan desa yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 5) Memberikan pelatihan atau seminar kepada masyarakat agar dapat memahami posisinya dalam pemberdayaan agar dapat meningkatkan partisipasi pembangunan desa.
- 6) Memberi himbauan kepada masyarakat setempat agar menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta senantiasa menjaga keasrian lingkungan Kandri.
- 7) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana seperti gedung atau pusat oleh-oleh, stan UMKM, lahan parkir, kereta wisata, gazebo, toilet, tempat mandi, dan pembenahan sarana

prasarana lainnya yang sudah tersedia namun mengalami kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A A Nyoman Sri Wahyuni. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Ekologis Di Desa Nyambu Kediri, Tabanan. *Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management*, 3, 109–122.
- Ajeng Dini Utami. (2019). *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Antara, M., & Arida, N. S. (2015). *Panduan pengelolaan desa wisata berbasis potensi lokal*.
- Ardito Bhinadi. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish Publisher.
- Choirul Ramadhan, Ari Subowo, M. (2022). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Pada Desa Wisata Kandri Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), 77–97.
- Desi Pravita, E. (2018). *Pengembangan Desa Wisata*. CV Graha Printama Selaras.
- Dewani, I., Adnan, M., & Adhi, S. (2017). **KERJASAMA PEMERINTAH KOTA**

- SEMARANG (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA) DENGAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) PANDANARAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA KANDRI SEMARANG. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(03), 21–30.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Irwan, I., & Agustang, A. (2021). Strategi Keberdayaan Masyarakat Menuju Desa Wisata Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan. *Seminar Nasional LP2M UNM*.
- Iskandar. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press (GP Press).
- Isnaningtyas, Y., & Marlina, N. (2017). Analisis Kemitraan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(03), 551–560.
- Keban, Y. T. (2014). *ENAM DIMENSI STRATEGIS ADMINISTRASI PUBLIK*. Gava media.
- Khadijah, U., Padjajaran, U., Novianti, E., & Padjajaran, U. (2020). COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE DEVELOPMENT OF MANGROVE TOURISM IN BATU KARAS OF PANGANDARAN , WEST JAVA. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 31(November), 972–978. <https://doi.org/10.30892/gtg.3>
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga.
- Mathew, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Universitas Indonesia - Press.
- Prabowo, D., & Pamurti, A. A. (2021). KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI KONSEP DESA WISATA KANDRI DI KOTA SEMARANG. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 10(2), 221–227.
- Purnomo, S., Rahayu, E. S., & Riani, A. L. (2020). Empowerment Model for Sustainable Tourism Village in an Emerging Country. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2), 261–270.

<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.261>

- Pusat, J., Masyarakat, I., & Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening (Community Empowerment Through Development of Tourist Villages in Sukawening Village). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(1), 53–62.
- Rahmawati, A. H., Warsono, H., & Hidayat, Z. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(1), 147–160.
- Setiani, M. (2014). MENDUKUNG PENGEMBANGAN DESA WISATA (Studi di Desa Penusupan , Kabupaten Kebumen , Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Populis*, 5(2000), 1369–1382.
- Subekti, E. E. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Bukit Sulisty Di Desa Kalitengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 293–299.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumual, R., Pusung, P., & Jaftoran, F. (2021). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata urongo kecamatan tondano selatan kabupaten minahasa provinsi sulawesi utara. *Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(1), 85–100.
- Supriatna, A. (2020). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di desa rawabogo kecamatan ciwidey kabupaten bandung provinsi jawa barat. *Jurnal Pemerintahan Daerah Indonesia*, 12(3), 561–578.
- Suranggajiwa, E. T. (2011). *Objek Wisata Goa Kreo dan Kehidupan Ekonomi Sosial-Budaya Masyarakat Kandri, Gunungpati Semarang Tahun 1986-2009*. Universitas Negeri Semarang.
- Totok, M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- W, R. W. A., & Kunyanti, S. A. (2021). Community Empowerment-based Corporate Social Responsibility Program in Panglima Raja Village. *Journal on Social Science, Economics and Art*, 11(40), 12–19.